

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS  
JL. R. AGIL KUSUMADYA NO. 44 TELP (0291) 435111 KUDUS 59343**



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111 Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 050.24 / 015 TAHUN 2022

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan guna penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus;
  - b. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus;
  - c. merumuskan rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS



Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Kudus

Nomor :

Tanggal : 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2022

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KELOMPOK KERJA
1. 2.	Sekretaris DPRD Kepala Bagian Keuangan	Ketua Sekretaris	Ketua Sekretaris I. Bagian Umum : <b>Ketua :</b> Kepala Bagian Umum dan Humas <b>Anggota :</b> - Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian - Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan  II. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan <b>Ketua :</b> Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan <b>Anggota :</b> - Analis Kebijakan Ahli Muda/Muda - Analis Hukum Ahli Muda/Muda  III. Bagian Keuangan <b>Ketua :</b> Kepala Bagian Keuangan <b>Anggota :</b> - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran - Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS





**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jalan R.Agil Kusumadya Nomor 44 Telp. (0291) 435111 Fax. (0291) 435594  
**KUDUS 59343**

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 050.2.4 / 016 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA KERJA PERUBAHAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor : 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus tentang Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19 ) dan/atau dalam



rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi UU No 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6515) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( LNRI Tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6573 );
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6402 );

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RKPD ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218 );



19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus yang memuat kebijakan perubahan penganggaran program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUDUS

  
DJATI SOLECHAH

Telah diteliti atas kebenarannya		
No.	Jabatan	Paraf
1		
2		
3	Kepala Bagian / Kantor / Bidang / Koordinator	
4	Kasubbag / Subkoordinator	
5	Lainnya	



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan.....	3
1.5 Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD.....</b>	<b>4</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Sampai dengan Tri Wulan II.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terkait Renja Perubahan.....	8
<b>BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA     TAHUN 2022 .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>15</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Tabel 2.1 Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus	
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus	
Tabel 2.3 Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pengertian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022 merupakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi/perkiraan pelayanan, kondisi/kebutuhan mendesak yang berdampak pada pagu indikatif (bertambah atau berkurang), target kinerja, atau menambah ataupun mengurangi kegiatan dan juga merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 yang mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategik dari masing masing SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 diawali dengan koordinasi antar bagian yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.

Dalam rangka efektif serta efisien perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, Sekretaris DPRD menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2022.

#### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum yang dipakai dalam penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193).
19. Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);



20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### 1. Maksud Penyusunan Perubahan Renja

Maksud penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus adalah memberikan isi pada Program Pembangunan Daerah yang termuat dalam Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

#### 2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renja

- a. Memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Guna memberikan arah pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Agar perencanaan lebih berkesinambungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memuaskan pihak-pihak yang harus dilayani.

### **1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN**

Dasar Pertimbangan Perubahan :

- Memenuhi Rencana Kerja DPRD
- Memenuhi kebutuhan sarana prasarana dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
- Menambah volume dan jenis barang jasa dalam memfasilitasi kegiatan DPRD

### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra SKPD dengan Renja SKPD dan sistematika penulisan.

#### Bab II Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD hingga Triwulan II tahun 2022 dan dilakukan analisa per urusan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Bab III Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat usulan dan revisi kegiatan perubahan.

#### Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan .

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRI WULAN II**

A. Program/kegiatan yang realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada :

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tingkat capaian kinerja dan anggaran masih 0% .

Hal ini karena jadwal pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tri wulan III bulan September.

b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran masih 0%.

Hal ini karena kegiatan baru tahap proses pelelangan.

c. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD :

Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran masih 0% .

Hal ini karena pelaksanaan kegiatan baru dalam proses pengadaan barang.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran masih 0%.

Hal ini karena kegiatan direncanakan pada bulan Agustus.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD :

Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran masih 0%.

Hal ini karena menyesuaikan agenda Rencana Kerja DPRD serta menunggu hasil penyusunan Naskah Akademik.

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan dan/ atau Naskah Akademik capaian kinerja dan realisasi anggaran masih 0% .

Hal ini karena penyusunan Naskah Akademik masih dalam proses penyusunan oleh Tenaga Ahli.

b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD :

Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli capaian kinerja dan realisasi anggaran masih 0%.



Hal ini karena permasalahan di DPRD dapat diselesaikan secara intern oleh Pimpinan DPRD dan Alat kelengkapan.

Sub kegiatan kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah capaian kinerja sebesar 2,54% dan realisasi anggaran 0,28%.

Hal ini disebabkan karena waktu tempuh tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan sehingga anggaran tidak bisa dikeluarkan.

B. Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada

a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja:

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 52,63% sudah memenuhi target dan capaian realisasi anggaran sebesar 34,19 %.

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 71,43% sudah memenuhi target dan capaian realisasi anggaran sebesar 29,24%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN capaian kinerja sebesar 50% sudah memenuhi target dan capaian realisasi anggaran sebesar 37,38%.

Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD capaian kinerja sebesar 50% sudah memenuhi target dan realisasi anggaran sebesar 23,35%.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:

Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD capaian kinerja sebesar 50% sudah mencapai target kinerja dan realisasi anggaran sebesar 35,26%.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan capaian kinerja sebesar 63,93% sudah sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 51,29%.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor capaian kinerja sebesar 58,06% sudah mencapai target dan realisasi anggaran sebesar 12,05%.

Sub kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor capaian kinerja sebesar 25,35% sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 13,7%

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga capaian kinerja sebesar 88,89% sudah sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 23,89%.



Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor capaian kinerja sebesar 66,67% sudah sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 39,07%.

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan capaian kinerja sebesar 11,11% sudah sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 1,18%.

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan capaian kinerja sebesar 51,72% sudah sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 47,42%.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD capaian kinerja sebesar 50,77% sudah sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 33,42%

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub kegiatan Pengadaan Mebel capaian kinerja sebesar 12,5 % sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 0,67%.

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya capaian kinerja sebesar 72,73% dan realisasi anggaran sebesar 48,64%.

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan lainnya capaian kinerja sebesar 78,57% dan realisasi anggaran sebesar 8,27 %.

g. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD capaian kinerja sebesar 50% sesuai target dan capaian realisasi anggaran sebesar 45,19%.

h. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.

Sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD capaian kinerja sebesar 19,62% sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 14,22%.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah capaian kinerja sebesar 29,55% sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 20,38%.

b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub kegiatan Pembahasan APBD capaian kinerja sebesar 47,79% sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 23 %.

c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum capaian kinerja sebesar 67,86% sesuai target dan relisasi anggaran sebesar 32,27%.

Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur capaian kinerja sebesar 62,43% sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 29,49%.

Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang kesejahteraan rakyat capaian kinerja sebesar 62,89% sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 26,3%.

Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian capaian kinerja sebesar 68,75% sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 31,31%.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD capaian kinerja sebesar 73,78% sesuai target dan realisasi anggaran 53,48%.

Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi capaian kinerja sebesar 57,86% sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 50,99%.

e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub kegiatan Pelaksanaan reses capaian kinerja sebesar 33,33% sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 17%.

i. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD capaian kinerja sebesar 22,22% sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 18,61%.

ii. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD capaian kinerja sebesar 14,26% sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 1,21%.

iii. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah capaian kinerja sebesar 43,75% sesuai target dan realisasi anggaran sebesar 15,9%.

iv. Sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD capaian kinerja sebesar 29,3% sesuai agenda kerja pimpinan DPRD dan realisasi anggaran sebesar 16,38%.

C. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil /keluaran pada Triwulan II antara lain karena :

- Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada jadwal Triwulan III dan IV
- Adanya kegiatan yang menyesuaikan kebutuhan Anggota DPRD

D. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut yaitu:

Melakukan koordinasi antar bagian yang terkait terhadap kegiatan yang belum memenuhi target di atas.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD hingga Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada tabel 2.1 sebagaimana terlampir.



## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja Program . Di tahun 2021 target dan capaian pelayanan Sekretariat DPRD telah terpenuhi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tertuang dalam tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

Pada Tabel 2.2 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa realisasi capaian Program Pelayanan Administrasi Umum pada Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 sebesar 91,08 sehingga capaian kinerja sebesar 109,73%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,58% dan sudah memenuhi terhadap jangka menengah yang terdapat pada Renstra.
- Capaian kinerja presentase Dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja keuangan yang tersusun Tahun 2021 sebesar 100%. Angka tersebut sudah memenuhi terhadap jangka menengah yang terdapat pada Renstra.
- Realisasi capaian Program Peningkatan Kapasitas DPRD pada Indikator Persentase Agenda Kerja DPRD yang terealisasi belum mencapai 100% tetapi bisa terpenuhi karena agenda kerja DPRD pada Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli tidak digunakan karena DPRD tidak ada kasus hukum yang harus diselesaikan dengan menggunakan Jasa Tim Ahli.
- Realisasi capaian program Penyelenggaraan Kehumasan pada indikator Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan sudah terpenuhi.

## **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH TERKAIT RENJA PERUBAHAN**

- a. Pemenuhan Rencana Kerja DPRD yang tertuang dalam kegiatan DPRD merupakan bentuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang harus dijalankan sebagai representasi rakyat di daerah.
- b. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan Anggota DPRD Kabupaten Kudus dapat menjadi dorongan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dalam memenuhi sarana prasarana penunjang untuk memfasilitasi kegiatan DPRD.

### **BAB III**

#### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah RPJMD Kabupaten Kudus, Renstra Sekretariat DPRD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus tahun 2022. Rencana program dan kegiatan Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022. terdapat sebanyak 2 Program dengan 17 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan.

Adapun uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

##### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - 3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanga
  - 5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6.1. Pengadaan Mebel
  - 6.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 8.2. Pemeliharaan Mebel
  - 8.3. Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
  - 8.4. Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  - 9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
  - 9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
  - 9.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
10. Layanan Administrasi DPRD
  - 10.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD KEGIATAN :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  - 1.1 Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
  - 1.2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
  - 1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
  - 1.4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - 2.1. Pembahasan APBD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - 3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
  - 3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
  - 3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - 3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
  - 4.1. Pendalaman Tugas DPRD
  - 4.2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
  - 4.3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
  - 4.4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5. Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - 5.1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
  - 5.2. Pelaksanaan Reses
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  - 6.1. Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Fasilitasi Tugas DPRD
  - 7.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
  - 7.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
  - 7.3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Rencana dan Program kegiatan Sekretariat DPRD mengalami penambahan pagu anggaran. dapat di jelaskan pada tabel 3.1 berikut :

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan analisa beberapa kegiatan yang mengalami perubahan anggaran.

Pagu Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 sebesar Rp.83.095.358.000,- . Pagu Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2022 sebesar Rp. 96.345.331.604,-

Dari Pagu awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 mengalami kenaikan sejumlah Rp.13.249.973.604,- atau sebesar 15,95% sesuai dengan pagu yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Kudus.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD awal sebesar Rp.55.041.033.000,- dan pada pagu anggaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Rencana Kerja Perubahan jumlah anggaran sebesar Rp.59.325.824.604,- atau mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp.4.284.791.604,- atau sebesar 7,78%.

Kenaikan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dirinci sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jumlah anggaran semula Rp 4.231.347.000 menjadi Rp 4.281.320.604 terjadi kenaikan sebesar Rp 49.973.604 atau sebesar 1,18%

Dasar perubahan ini disebabkan karena adanya kenaikan TPP THR sehingga perlu dimasukkan dalam perubahan RKPD;

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah anggaran semula Rp 225.822.000 menjadi Rp 410.779.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 184.957.000 atau sebesar 81,9%.

Dasar perubahan ini disebabkan peralatan yang ada sudah tidak kompatibel sehingga membutuhkan penyesuaian/peremajaan;

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah anggaran semula Rp 143.818.200 menjadi Rp 175.792.440 terjadi kenaikan sebesar Rp 31.974.240 atau sebesar 22,23%.

Dasar perubahan ini untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan dalam penataan ruangan Pimpinan;

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah anggaran semula Rp 523.698.480 menjadi Rp 663.307.280 terjadi kenaikan sebesar Rp 139.608.800 atau sebesar 26,66%.

Dasar perubahan ini untuk mengantisipasi kebutuhan logistik dalam penerimaan tamu pimpinan/rapat dengar pendapat yang mengalami kenaikan volume;



5. **Pengadaan Mebel**  
Sub kegiatan Pengadaan Mebel jumlah anggaran semula Rp 692.367.172 menjadi Rp 1.877.609.172 terjadi kenaikan sebesar Rp 1.185.242.000 atau sebesar 171,19%.  
Dasar perubahan ini disebabkan adanya gedung baru membutuhkan mebelair yang sesuai dengan peruntukannya;
6. **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**  
Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah anggaran semula Rp 6.576.863.420 menjadi Rp 6.646.912.220 terjadi kenaikan sebesar Rp 70.048.800 atau sebesar 1,07%.  
Dasar perubahan ini disebabkan adanya pembangunan eks garasi untuk Ruang Fraksi membutuhkan perencanaan dalam pembangunannya (DED);
7. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**  
Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah anggaran semula Rp 1.838.541.300 menjadi Rp 2.125.516.300 terjadi kenaikan sebesar Rp 286.975.000 atau sebesar 15,61%.  
Dasar perubahan ini untuk memenuhi sarana prasarana gedung fraksi;
8. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya**  
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya jumlah anggaran semula Rp 1.270.746.986 menjadi Rp 1.609.372.146 terjadi kenaikan sebesar Rp 338.625.160 atau sebesar 26,65%.  
Dasar perubahan ini disebabkan untuk merenovasi partisi interior Ruang Rapat Paripurna;
9. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**  
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah anggaran semula Rp 677.423.907 menjadi Rp 2.752.085.907 terjadi kenaikan sebesar Rp 1.894.662.000 atau sebesar 279,69%.  
Dasar perubahan ini disebabkan dengan adanya perkembangan teknologi maka dalam memfasilitasi kegiatan DPRD membutuhkan update teknologi terkini.

Sedangkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada pagu awal Renja sebesar Rp. 28.054.325.000,- dan pada RKPD perubahan Tahun 2022 sebesar Rp. 37.019.507.000,- atau mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 8.965.182.000,- atau sebesar 31,96 %.

Kenaikan anggaran pada Program ini karena menyesuaikan Kebutuhan Rencana Kerja DPRD pada Tahun 2022, meliputi Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan  
Sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan jumlah anggaran semula Rp 331.378.000 menjadi Rp 1.656.890.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 1.325.512.000 atau sebesar 400%.
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum  
Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum jumlah anggaran semula Rp 1.218.450.000 menjadi Rp 1.880.685.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 662.235.000 atau sebesar 54,35%.
3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur  
Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur jumlah anggaran semula Rp 1.626.894.000 menjadi Rp 1.821.105.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 194.211.000 atau sebesar 11,94%.
4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat  
Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat jumlah anggaran semula Rp 1.520.868.000 menjadi Rp 2.028.141.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 507.273.000 atau sebesar 33,35%.
5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian  
Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian jumlah anggaran semula Rp 1.417.662.000 menjadi Rp 2.073.951.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 656.286.000 atau sebesar 46,29%.
6. Pendalaman Tugas DPRD  
Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD jumlah anggaran semula Rp 1.201.213.000 menjadi Rp 2.178.468.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 977.255.000 atau sebesar 81,36%.
7. Publikasi dan Dokumentasi Dewan  
Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan jumlah anggaran semula Rp 3.868.036.000 menjadi Rp 6.117.725.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 2.249.689.000 atau sebesar 58,16%.
8. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli  
Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli jumlah anggaran semula Rp 145.250.000 menjadi Rp 345.250.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 200.000.000 atau sebesar 137,69%.
9. Kunjungan Kerja Dalam Daerah  
Sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah jumlah anggaran semula Rp 106.500.000 menjadi Rp 42.600.000 terjadi pengurangan sebesar Rp 63.900.000 atau sebesar minus 60%.
10. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD  
Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD jumlah anggaran semula Rp 2.111.016.000 menjadi Rp 2.723.878.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 612.862.000 atau sebesar 29,03%.



11. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah jumlah anggaran semula Rp 2.971.116.000 menjadi Rp 3.563.340.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 592.224.000 atau sebesar 19,93%.

12. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD jumlah anggaran semula Rp 4.884.800.000 menjadi Rp 5.936.332.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 1.051.532.000 atau sebesar 21,53%.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja perubahan Tahun 2022 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022 akan dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan, dan juga sebagai acuan kegiatan dan indikator pengukuran kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus sebagai bagian dari instansi Pemerintah Kabupaten Kudus.

Rencana Kerja perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

Disamping hal tersebut Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan menyesuaikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku disertai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Kudus,

2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS



**DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680703 198803 2 009



**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

TABEL 2.1

**LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD**  
**PERIODE PELAKSANAAN : 2022**  
**TRIWULAN II**

(\* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			55.041.033		8.911.637		7.605.307		0		0		16.516.944		30,01	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks		90,57		90,57		0		0		90,57		108,47		
		Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	100 persen		23		46		0		0		46		46		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.055		1.975		837		0		0		2.811		27,96	
		Jumlah data/dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	26 dokumen		10		2		0		0		12		46,15		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.480		1.720		837		0		0		2.557		34,19	
		Jumlah dokumen penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai aturan	19 dokumen		6		1		0		0		7		36,84		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.576		255		0		0		0		255		9,88	
		Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	7 dokumen		4		1		0		0		5		71,43		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.236.582		572.659		713.670		0		0		1.286.329		30,36	
		Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standart	56 dokumen		10		11		0		0		21		37,5		



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.231.347		571.436		713.670		0		0		1.285.106		30,37	
		Jumlah dokumen penerima gaji dan tunjangan ASN	44 dokumen		7		9		0		0		16		36,36		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.235		1.223		0		0		0		1.223		23,35	
		Jumlah dokumen pelaporan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standart	12 dokumen		3		2		0		0		5		41,67		
X.XX.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			156.000		0		55.000		0		0		55.000		35,26	
		<b>Jumlah aset kantor ( sewa tanah dan angsuransi gedung ) yang terbayar</b>	2 unit		0		1		0		0		1		50		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			156.000		0		55.000		0		0		55.000		35,26	
		Jumlah sewa tanah dan premi asuransi kebakaran gedung yang terbayar	2 unit		0		1		0		0		1		50		
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			446.066		125.740		0		0		0		125.740		28,19	
		<b>Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat</b>	464 Orang/kali		96		0		0		0		96		20,69		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			48.364		0		0		0		0		0		0	Rencana kegiatan dimulai pada bulan September 2022
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai kinerja aparatur	220 orang/kali		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			397.702		125.740		0		0		0		125.740		31,62	
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai implementasi perundang-undangan	244 orang/kali		96		0		0		0		96		39,34		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			1.332.035		195.953		84.970		0		0		280.923		21,09	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<b>Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Jumlah koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD</b>	<b>421 jenis/OK</b>		<b>175</b>		<b>14</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>189</b>		<b>44,89</b>	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			133.651		10.300		3.029		0		0		13.329		9,97	
		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	31 jenis		9		8		0		0		17		54,84		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			225.822		14.177		9.969		0		0		24.146		10,69	
		Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	71 jenis		18		0		0		0		18		25,35		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			143.818		6.732		24.132		0		0		30.864		21,46	
		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	9 jenis		4		0		0		0		4		44,44		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			523.698		118.926		38.250		0		0		157.176		30,01	
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman kantor	12 jenis		8		0		0		0		8		66,67		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			35.663		423		0		0		0		423		1,18	
		Jumlah barang cetak dan penggandaan	9 jenis		1		0		0		0		1		11,11		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			53.400		11.695		6.700		0		0		18.395		34,45	
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	29 jenis		7		6		0		0		13		44,83		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			215.982		33.701		2.890		0		0		36.591		16,94	
		Jumlah koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	260 Orang/kali		128		0		0		0		128		49,23		



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			9.107.772		0		192.833	0	0		192.833		2,12			
		<b>Terselenggaranya pengadaan sarpras kantor</b>	23 unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			692.367		0		0	0	0		0		0		0	Rencana Pengadaan pada tri wulan IV setelah selesai pengadaan gedung kantor
		Jumlah pengadaan Mebeleur Kantor	8 unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.576.863		0		0	0	0		0		0		0	Proses tender sedang berjalan
		Jumlah rehab/pembangunan gedung kantor	1 unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.838.541		0		192.833	0	0		192.833		10,49		10,49	Pengadaan direncanakan pada tw.IV
		Jumlah pengadaan sarpras kantor	14 unit		0	12	0	0	12	85,71							
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			2.256.726		463.546		313.201	0	0		776.747		34,42			
		<b>Tersedianya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemeintah Daerah</b>	897 jenis/Orang /bulan		194	145	0	0	339	37,79							
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.750		1.000		1.033	0	0		2.033		23,23			
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis		1	0	0	0	1	50							
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			538.029		73.319		46.133	0	0		119.452		22,2			
		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84 jenis/bulan		18	2	0	0	20	23,81							
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.709.947		389.226		266.036	0	0		655.262		38,32			
		Jumlah pelaksanaan kegiatan dan tenaga kontrak yang terbayar	811 orang/bulan		175	143	0	0	318	39,21							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			2.364.427		205.647		517.488		0		0		723.135		30,58	
		<b>Jumlah Aset Kantor Yang Terpelihara</b>	<b>99 Unit</b>		<b>43</b>		<b>8</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>51</b>		<b>51,52</b>		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			398.140		67.170		41.595		0		0		108.764		27,32	
		Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, mobil sarpras kantor (kendaraan dinas/oprasional) yang terpelihara	40 unit		25		1		0		0		26		65		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			18.116		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah sarpras kantor (mebeleur) yang terpelihara	20 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.270.747		122.130		443.309		0		0		565.439		44,5	
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi	11 unit		5		2		0		0		7		63,64		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			677.424		16.348		32.584		0		0		48.932		7,22	
		Jumlah sarpras kantor (peralatan Kantor) yang terpeliharai	28 jenis		13		2		0		0		15		53,57		
X.XX.01.2.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>			34.741.841		7.311.343		5.718.538		0		0		13.029.882		37,5	
		<b>Jumlah layanan administrasi DPRD</b>	<b>726 orang/bulan/stel</b>		<b>135</b>		<b>90</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>225</b>		<b>30,99</b>		
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			34.206.952		7.304.908		5.717.038		0		0		13.021.947		38,07	
		Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan keuangan	540 orang/bulan		135		90		0		0		225		41,67		



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			409.980		6.435		1.500	0	0			7.935			1,94	
		Jenis dan jumlah pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	141 stel		0		0		0	0			0		0		
X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			124.909		0		0	0	0			0		0		Rencana kegiatan pada bulan Agustus 2022
		Jumlah Anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan	45 orang		0		0		0	0			0		0		
X.XX.01.2.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>			<b>389.529</b>		<b>34.775</b>		<b>8.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>43.545</b>			<b>11,18</b>	
		<b>Jumlah layanan administrasi DPRD</b>	<b>7817 Kali</b>		<b>961</b>		<b>75</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1036</b>		<b>13,25</b>		
X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			389.529		34.775		8.770	0	0			43.545			11,18	
		Jumlah rapat DPRD yang difasilitasi	7817 kali		961		75		0	0			1036		13,25		
4.02.02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>			<b>28.054.325</b>		<b>2.820.227</b>		<b>2.171.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>4.992.214</b>			<b>17,79</b>	
		persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen		17,02		36,16		0	0			36,16		36,16		
4.02.02.2.01	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>			<b>3.178.106</b>		<b>49.134</b>		<b>34.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>84.114</b>			<b>2,65</b>	
		<b>Jumlah fasilitasi kegiatan pembentukan perda dan peraturan DPRD</b>	<b>1490 ok</b>		<b>0</b>		<b>71</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>71</b>		<b>4,77</b>		
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			902.848		49.134		34.980	0	0			84.114			9,32	
		Jumlah fasilitasi tugas Bapemperda dalam/luar Provinsi	528 orang/kali		57		14		0	0			71		13,45		
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.543.880		0		0	0	0			0		0		Pelaksanaan Pembahasan Ranperda sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah
		Jumlah fasilitasi tugas Panitia Khusus dalam/luar Propinsi	742 orang/kali		0		0		0	0			0		0		



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			331.378		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kajian Rancangan/Produk Hukum/KUA PPAS	219 orang/kali		0		171		0		0		171		78,08			
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			400.000		0		0		0		0		0		0		Naskah Akademik sedang dalam proses penyusunan
		Jumlah fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	1 dokumen		0		0		0		0		0		0			
4.02.02.2.02	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>			1.925.648		186.935		166.146		0		0		353.081		18,34		
		<b>Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi</b>	816 orang/Kali		189		114		0		0		303		37,13			
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD			1.925.648		186.935		166.146		0		0		353.081		18,34		
		Jumlah fasilitasi tugas Badan Anggaran dalam/luar Provinsi	816 orang/kali		189		114		0		0		303		37,13			
4.02.02.2.03	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>			5.783.874		556.303		421.015		0		0		977.318		16,9		
		<b>Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan pemerintahan yang dilakukan DPRD</b>	2730 orang/Kali		538		735		0		0		1273		46,63			
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			1.218.450		115.094		102.447		0		0		217.541		17,85		
		Jumlah fasilitasi tugas Komisi A dalam/luar Provinsi	588 orang/kali		109		171		0		0		280		47,62			
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			1.626.894		173.899		111.692		0		0		285.591		17,55		
		Jumlah fasilitasi tugas Komisi C dalam/luar Provinsi	756 orang/kali		160		196		0		0		356		47,09			
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			1.520.868		126.085		104.371		0		0		230.455		15,15		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah fasilitasi tugas Komisi D dalam/luar Provinsi	714 orang/kali		136		164		0		0		300		42,02		
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			1.417.662		141.226		102.506		0		0		243.731		17,19	
		Jumlah fasilitasi tugas Komisi B dalam/luar Provinsi	672 orang/kali		133		204		0		0		337		50,15		
4.02.02.2.04	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>			<b>5.562.499</b>		<b>1.299.794</b>		<b>1.089.964</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2.389.758</b>		<b>42,96</b>	
		<b>Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD</b>	<b>1047 orang/kali</b>		<b>414</b>		<b>144</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>558</b>		<b>53,3</b>		
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD			1.201.213		570.747		307.554		0		0		878.301		73,12	
		Jumlah fasilitasi kegiatan Bimbingan teknis DPRD	492 orang/kali		327		12		0		0		339		68,9		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			3.868.036		678.047		731.410		0		0		1.409.457		36,44	
		Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD yang dipublikasikan	401 kali		80		118		0		0		198		49,38		
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			145.250		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah fasilitasi kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	58 orang/hari		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			348.000		51.000		51.000		0		0		102.000		29,31	
		Jumlah fasilitasi tenaga ahli fraksi yang tersedia	96 orang/bulan		21		14		0		0		35		36,46		
4.02.02.2.05	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>			<b>1.274.250</b>		<b>0</b>		<b>198.480</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>198.480</b>		<b>15,58</b>	
		<b>Jumlah fasilitasi kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat</b>	<b>14210 orang/Kali</b>		<b>0</b>		<b>4512</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4512</b>		<b>31,75</b>		
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			106.500		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD dalam Daerah	710 orang/kali		0		12		0		0		12		1,69		



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses			1.167.750		0		198.480		0		0		198.480		17	
		Jumlah fasilitasi kegiatan reses	13500 orang/kali		0		4500		0		0		4500		33,33		
4.02.02.2.06	<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>			363.016		25.497		-4.857		0		0		20.640		5,69	
		<i>Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan</i>	216 orang/kali		0		21		0		0		21		9,72		
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD			363.016		25.497		-4.857		0		0		20.640		5,69	
		Jumlah fasilitasi tugas Badan Kehormatan dalam/luar Provinsi	216 orang/kali		0		21		0		0		21		9,72		
4.02.02.2.08	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>			9.966.932		702.564		266.259		0		0		968.823		9,72	
		<i>Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan</i>	4170 orang/Kali		530		333		0		0		863		20,7		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			2.111.016		0		25.497		0		0		25.497		1,21	Tidak diagendakan oleh Banmusy pada bulan Mei
		Jumlah fasilitasi tugas koordinasi konsultasi alat kelengkapan DPRD	1178 orang/kali		24		0		0		0		24		2,04		
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			2.971.116		289.420		76.678		0		0		366.098		12,32	
		Jumlah fasilitasi tugas Badan Musyawarah dalam/luar provinsi	1296 orang/kali		294		183		0		0		477		36,81		
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			4.884.800		413.144		164.083		0		0		577.228		11,82	
		Jumlah fasilitasi Penyusunan naskah, fasilitasi tugas, koordinasi, konsultasi Pimpinan DPRD	1696 orang/kali		212		150		0		0		362		21,34		
JUMLAH				83.095.358		21.509.158								21.509.158			
<b>Rata - rata capaian kinerja OPD (%)</b>															<b>42,93</b>	<b>25,88</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>															<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>	



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I	II	III	IV						
1	2	3	4		5	6	7	8	9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :  
Pencapaian target kinerja dan anggaran didukung kerjasama dan koordinasi antar bagian

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :  
Pencapaian target kinerja dan anggaran menyesuaikan agenda kegiatan DPRD yang mengalami dinamika

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :  
Perlu sinkronisasi serapan fisik dan dananya ditriwulan mendatang

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya  
Perhitungkan dengan seksama penentuan target kinerja agar capaian bisa maksimal

Kudus, ..... 2022

Dievaluasi oleh,

Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS



ABDJAD ATFIYAH NOOR, SH

Pembina

NIP. 19700803 198903 2 001

Kudus, ..... 2022

Disusun oleh,

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUDUS



DJATI SOLECHAH, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680703 198803 2 009

**Tabel 3.1**  
**PRIORITAS PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS**  
**TAHUN 2022**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4 02 01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>55,041,033,000</b>	<b>59,325,824,604</b>		
4 02 01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>10,055,175</b>	<b>10,055,175</b>		
4 02 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah dokumen penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai aturan	19 dokumen	19 dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	7,479,560	7,479,560	
4 02 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	7 dokumen	7 dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	2,575,615	2,575,615	
4 02 01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>4,236,582,000</b>	<b>4,286,555,604</b>		
4 02 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah dokumen penerima gaji dan tunjangan ASN	44 dokumen	44 dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	4,231,347,000	4,281,320,604	
4 02 01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah dokumen pelaporan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standart	12 dokumen	12 dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	5,235,000	5,235,000	
4 02 01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>										<b>156,000,000</b>	<b>156,000,000</b>		
4 02 01	2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah sewa tanah dan premi asuransi kebakaran gedung yang terbayar	2 unit	2 unit	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	156,000,000	156,000,000	
4 02 01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										<b>446,066,240</b>	<b>446,066,240</b>		
4 02 01	2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai kinerja aparatur	220 orang/kali	220 orang/kali	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	48,364,240	48,364,240	



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai implementasi perundang-undangan	244 orang/kali	244 orang/kali	Indeks Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	397,702,000	397,702,000	
4 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>1,332,035,056</b>	<b>1,688,575,096</b>		
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	31 jenis	31 jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD) Daerah	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	133,651,376	133,651,376	
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	71 jenis	74 jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD) Daerah	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	225,822,000	410,779,000	
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	9 jenis	24 jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD) Daerah	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	143,818,200	175,792,440	
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah penyediaan makanan dan minuman kantor	12 jenis	12 jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD) Daerah	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	523,698,480	663,307,280	
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah barang cetak dan penggandaan	9 jenis	9 jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD) Daerah	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	35,663,000	35,663,000	



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	29 jenis	29 jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD) Daerah	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	53,400,000	53,400,000	
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	260 Orang/kali	260 Orang/kali	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD) Daerah	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Jati Kulon	215,982,000	215,982,000	
<b>4 02 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>9,107,771,892</b>	<b>10,650,037,692</b>		
4 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah pengadaan kendaraan mobil dinas jabatan	4 unit	0 unit	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah pengadaan sepeda motor/operasional yang disediakan	1 unit	0 unit	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah pengadaan Mebeleur Kantor	8 unit	13 unit	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	692,367,172	1,877,609,172	
4 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah rehab/pembangunan gedung kantor	1 unit	3 unit	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	6,576,863,420	6,646,912,220	
4 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah pengadaan sarpras kantor	14 unit	23 unit	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	1,838,541,300	2,125,516,300	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											2,256,726,179	2,256,726,179	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	2 jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	8,750,000	8,750,000	
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84 jenis/bulan	84 jenis/bulan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	538,029,179	538,029,179	
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan tenaga kontrak yang terbayar	811 orang/bulan	811 orang/bulan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,709,947,000	1,709,947,000	
4 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											2,364,426,893	4,597,714,053	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, mobil sarpras kantor (kendaraan dinas/Jabatan) yang terpelihara jabatan	4 unit	0 unit	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, mobil sarpras kantor (kendaraan dinas/operasional) yang terpelihara	40 unit	40 unit	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	398,140,000	398,140,000	



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah sarpras kantor (mebeleur) yang terpelihara	20 unit	20 unit	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	18,116,000	18,116,000	
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang terpelihara/rehabilitasi	1 unit	15 unit	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	1,270,746,986	1,609,372,146	
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah sarpras kantor (peralatan Kantor) yang terpelihara	28 jenis	32 jenis	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	677,423,907	2,572,085,907	
<b>4 02 01 2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>											<b>34,741,841,000</b>	<b>34,741,841,000</b>	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan keuangan	540 orang/bulan	540 orang/bulan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	34,206,952,000	34,206,952,000	
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jenis dan jumlah pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	141 stel	141 stel	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	409,980,000	409,980,000	
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah Anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan	45 orang	45 orang	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	124,909,000	124,909,000	
<b>4 02 01 2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>											<b>389,528,565</b>	<b>492,253,565</b>	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	83,5 Indeks	Jumlah rapat DPRD yang difasilitasi	7817 kali	7817 kali	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Set DPRD)	83.5 indeks	83.5 indeks	Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten	389,528,565	492,253,565	



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
4	02	02			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>										<b>28,054,325,000</b>	<b>37,019,507,000</b>		
4	02	02	2.01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>										<b>3,178,106,000</b>	<b>4,503,618,000</b>		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi tugas Bapemperda dalam/luar Provinsi	528 orang/kali	528 orang/kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	902,848,000	902,848,000	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi tugas Panitia Khusus dalam/luar Propinsi	742 orang/kali	742 orang/kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,543,880,000	1,543,880,000	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi kegiatan kajian Rancangan/Produk Hukum/KUA PPAS	219 orang/kali	870 orang/kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	331,378,000	1,656,890,000	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	1 dokumen	1 dokumen	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	400,000,000	
4	02	02	2.02		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>										<b>1,925,648,000</b>	<b>1,925,648,000</b>		
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi tugas Badan Anggaran dalam/luar Provinsi	816 orang/kali	816 orang/kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,925,648,000	1,925,648,000	
4	02	02	2.03		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>										<b>5,783,874,000</b>	<b>7,803,882,000</b>		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi tugas Komisi A dalam/luar Provinsi	588 orang/kali	1224 orang/kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,218,450,000	1,880,685,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi tugas Komisi C dalam/luar Provinsi	756 orang/kali	1152 orang/kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,626,894,000	1,821,105,000	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi tugas Komisi D dalam/luar Provinsi	714 orang/kali	1296 orang/kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,520,868,000	2,028,141,000	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi tugas Komisi B dalam/luar Provinsi	672 orang/kali	1296 orang/kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,417,662,000	2,073,951,000	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>										<b>5,562,499,000</b>	<b>8,989,443,000</b>		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi kegiatan Bimbingan teknis DPRD	492 orang/kali	594 orang/kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,201,213,000	2,178,468,000	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD yang dipublikasikan	401 kali	500 kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,868,036,000	6,117,725,000	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	58 orang/hari	58 orang/hari	Persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145,250,000	345,250,000	



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi tenaga ahli fraksi yang tersedia	96 orang/bulan	96 orang/bulan	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	348,000,000	348,000,000	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>										<b>1,274,250,000</b>	<b>1,210,350,000</b>		
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD dalam Daerah	710 orang/kali	284 orang/kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,500,000	42,600,000	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi kegiatan reses	13500 orang/kali	13500 orang/kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,167,750,000	1,167,750,000	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>										<b>363,016,000</b>	<b>363,016,000</b>		
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi tugas Badan Kehormatan dalam/luar Provinsi	216 orang/kali	216 orang/kali	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	363,016,000	363,016,000	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.08</b>		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>										<b>9,966,932,000</b>	<b>12,223,550,000</b>		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi tugas koordinasi konsultasi alat kelengkapan DPRD	1178 orang/kali	1716 orang/kali	Persentase Agenda Kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,111,016,000	2,723,878,000	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi tugas Badan Musyawarah dalam/luar provinsi	1296 orang/kali	1728 orang/kali	Persentase Agenda Kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,971,116,000	3,563,340,000	



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	persentase agenda kerja DPRD yang teralisasi	100 persen	100 persen	Jumlah fasilitasi Penyusunan naskah fasilitasi tugas, koordinasi, ko Pimpinan DPRD	1696 orang/kali	2341 orang/kali	Persentase Agenda Kerja DPRD yang teralisasi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,884,800,000	5,936,332,000	
<b>TOTAL</b>											<b>83,095,358,000</b>	<b>96,345,331,604</b>						